



**RINGKASAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2023**



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa telah disusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, menggunakan Sistematisa yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami beserta Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 ini dengan sebaik-baiknya, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan belumlah sempurna.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2023, agar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Palembang, 26 Maret 2024**

**Pi. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**



**Dr. Drs. A. FATONI, M.Si**



## DAFTAR ISI

### RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DASAR HUKUM .....	1
VISI DAN MISI KEPALA DAERAH .....	3
PRIORITAS DAERAH .....	32
DATA GEOGRAFIS WILAYAH .....	35
CAPAIAN KINERJA MAKRO .....	40
RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR .....	41
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023 .....	48
OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA .....	49
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH .....	51
INOVASI DAERAH .....	52
PENUTUP .....	85



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Dasar Hukum**

Berdasarkan Undang-Undang dibentuk sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814), telah dibentuk Provinsi Otonom Sumatera Selatan, yang wilayahnya meliputi Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung, dengan ibu kotanya berkedudukan di Kota Palembang.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sebagai "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran" serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah,



termasuk di dalam pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan dalam penyusunan APBD yang selama ini menggunakan Sistem Tunai yang lebih menekankan pada penggunaan sumber daya dan dana (*input*), diubah menjadi anggaran pendekatan kinerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, maka APBD disusun pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Arah dan kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah dan merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,, selanjutnya pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



## **Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah:

### ***SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA***

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut:

***Sumsel Maju untuk Semua*** adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

***Sumsel Maju untuk Semua*** adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

***Sumsel Maju untuk Semua*** adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

***Sumsel Maju untuk Semua*** adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

### **Misi**

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yaitu:

**Misi 1** : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.



**Misi 2 :** Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

**Misi 3 :** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

**Misi 4 :** Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

**Misi 5 :** Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

### **Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun pada RPJMD Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dilaksanakan melalui strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah sebagai berikut :

#### **Tabel**

*Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi, Arah Kebijakan serta Program pada*

**Misi 1: “Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan”.**

Tujuan 1 : Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1.1 Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Menggali Sumber Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempercepat berfungsinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</li> </ul>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
(Maju Ekonomi Kerakyatan)	Ekonomi Baru Melalui Sektor Pariwisata dan Industri Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"><li>di Sumatera Selatan.</li><li>Pengembangan Destinasi Wisata potensial.</li><li>Membangun Infrastruktur dalam mempercepat Pembangunan Perekonomian Rakyat.</li><li>Penyediaan Bank Data, Informasi, Potensi dan Perkembangan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Secara Komprehensif, <i>Realtime</i> dan <i>Online</i>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian</li><li>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li><li>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</li><li>Program Pengembangan UMKM</li><li>Program Perekonomian dan Pembangunan</li></ul>
	Mengoptimalkan Ekonomi Produktif Berbasis Kearifan Lokal	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia agar dapat Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing yang Lebih Baik.</li><li>Pengembangan Kerjasama melalui Program <i>Technopreneur</i>.</li><li>Meningkatkan Keterampilan, Wawasan, dan Pengetahuan Usaha Mikro untuk Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Produk.</li><li>Mendorong Pelaku Usaha Mikro untuk Meningkatkan Standard dan Kualitas Produk.</li><li>Membuka Wawasan para Usaha Mikro agar mendapat Akses Pembiayaan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).</li><li>Menambah Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro mengetahui kelengkapan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan modal</li></ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		dari perbankan.	
	<p>Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok</p> <p>Efektivitas Penggunaan Anggaran Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengefektifkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah.</li> <li>▪ Mengoptimalkan Pusat Distribusi Regional (PDR).</li> <li>▪ Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah untuk Pembangunan.</li> <li>▪ Pengembangan Kerjasama Unsur Akademisi, Bisnis, Government dalam Perumusan Kebijakan.</li> </ul>	
1.2 Meningkatkan Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)	<p>Mendorong Tersedianya Infrastruktur Mendukung Iklim Investasi.</p> <p>Memfasilitasi Pembangunan Industri Sektor Hilir dari Potensi Ekonomi Masyarakat agar dapat Memberikan Kesempatan Kerja Seluas-Luasnya serta Tingkat Pendapatan Pekerja Lebih Besar dan Lebih Merata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong Percepatan Infrastruktur Pendukung beroperasinya KEK Tanjung Api-Api dan Kawasan Industri Lainnya.</li> <li>▪ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik.</li> <li>▪ Mengoptimalkan Proses Perizinan untuk Investasi.</li> <li>▪ Mendorong Kondisi yang Kondusif bagi Investasi.</li> <li>▪ Peningkatan Citra Daerah sebagai Tujuan Investasi yang Menguntungkan Melalui Peningkatan Popularitas dalam berbagai Aspek.</li> <li>▪ Pengemasan Potensi dan Peluang Investasi Wilayah menjadi Menarik.</li> <li>▪ Menyusun dan Menyajikan Peluang Kegiatan Penanaman Modal yang Lebih Konkret.</li> <li>▪ Pengembangan Mekanisme Promosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>▪ Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>▪ Program Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>▪ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>▪ Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li> <li>▪ Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</li> <li>▪ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>▪ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li> <li>▪ Program Pengembangan Ekspor</li> <li>▪ Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</li> <li>▪ Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li> <li>▪ Program Perencanaan dan Pembangunan</li> </ul>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		<p>Investasi yang Lebih Efisien dan Efektif yang antara lain Melalui Penyelarasan Kegiatan Promosi <i>Tourism, Trade, And Investment</i> (TTI) dengan OPD terkait serta Peningkatan Penggunaan Media Elektronik yang Meliputi Radio, Televisi, Media Online dan Media Sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pelaksanaan Gelar Promosi Investasi Daerah untuk Mendorong Investor <i>Awareness And Willingness</i>.</li><li>▪ Fasilitasi Keikutsertaan UKM untuk Promosi dalam Rangka <i>Matchmaking</i> dengan Perusahaan Skala Besar serta Pembinaan Kemitraan Usaha dengan Strategi Naik Kelas/ Aliansi.</li><li>▪ Kerjasama dengan Pusat Promosi Terpadu di Negara-Negara Tertentu.</li><li>▪ Peningkatan Pertemuan Bisnis Antara Pelaku Usaha dengan Pemerintah Pusat Maupun Daerah.</li><li>▪ Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sektor Jasa dan IKM.</li></ul>	<p>Industri</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Program Pengendalian Izin Usaha Industri</li><li>▪ Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li></ul>
	Memperkuat daya saing ekspor dan mengendalikan impor untuk meningkatkan neraca perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Revitalisasi Pasar Tradisional Menuju Pasar Tradisional Modern.</li><li>▪ Meningkatkan Daya Saing Produk Industri Kecil dan Menengah.</li><li>▪ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri Kecil dan Menengah.</li></ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi Standarisasi Produk Industri Kecil dan Menengah.</li> </ul>	
1.3 Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan ( <i>Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan</i> )	Peningkatan Kesejahteraan Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kawasan Komoditas/Sektor Unggulan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.</li> <li>Meningkatkan Akses Petani Terhadap Saprodi Berkualitas dan Terjangkau.</li> <li>Meningkatkan Kinerja Jaringan Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa.</li> <li>Menjamin Ketersediaan Air di Lahan Irigasi dan Non Irigasi.</li> <li>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Prasarana di dan Keluar Sentra Produksi Komoditi Pangan.</li> <li>Mencetak Sawah Baru untuk Meningkatkan Produksi Padi dalam Rangka Meningkatkan Sumsel Lumbung Pangan.</li> <li>Peremajaan Tanaman yang Sudah Tua atau Kurang Produktif.</li> <li>Intensifikasi dan Ekstensifikasi.</li> <li>Peningkatan Sarana Panen.</li> <li>Peningkatan Kemampuan SDM Petani dalam Budidaya Tanaman.</li> <li>Penanggulangan OPT.</li> <li>Meningkatkan Harga Jual Komoditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>Program Penanganan Kerawanan Pangan</li> <li>Program Pengawasan Keamanan Pangan</li> <li>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> <li>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian</li> <li>Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian</li> <li>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat</li> <li>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>Program Perizinan Usaha Pertanian</li> <li>Program Penyuluhan Pertanian</li> </ul>
	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan/	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengupayakan Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan</li> </ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	Pembudidaya Ikan	dapat dilaksanakan agar Nilai Jual Nelayan Lebih Tinggi. <ul style="list-style-type: none"><li>Mengupayakan Pembudidaya Ikan dapat Memproduksi Pakan Sendiri dengan Mempergunakan Bahan Baku Lokal.</li></ul>	
	Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan  Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan Pembinaan Pemanfaatan Kawasan Hutan.</li><li>Monitoring Dan Evaluasi Peredaran Hasil Hutan.</li><li>Pemantapan Ketersediaan Pangan,</li><li>Peningkatan Distribusi dan Harga Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan Serta Ketersediaan Pangan.</li><li>Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat.</li><li>Gerakan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Mutu Pangan Segar.</li><li>Peningkatan Produksi Hasil Ternak.</li><li>Penanggulangan Penyakit Ternak dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).</li><li>Pemasaran dan Penerapan Teknologi Hasil Ternak.</li></ul>	
	Peningkatan Publikasi dan Pemanfaatan Hasil Litbang Dan Inovasi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Riset Berbasis Kebutuhan.</li><li>Meningkatkan Kualitas SDM Peneliti.</li><li>Melakukan Koordinasi dengan Pembuat Kebijakan dan Pelaku Bisnis.</li><li>Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi.</li><li>Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang</li></ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		dan Inovasi.	
1.4 Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran ( <i>Maju Kesejahteraan Masyarakat</i> )	Menekan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan sosial melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan Industri Pengolahan (Manufaktur) untuk Hilirisasi SDA Unggulan dengan Memprioritaskan Penggunaan Sebesar-Besarnya Tenaga Kerja Lokal dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (<i>Resources</i>)/ Bahan Baku Lokal.</li> <li>▪ Peningkatan Akses Angkatan Kerja Kepada Sumber Daya Produktif melalui Peningkatan Keterampilan Pekerja.</li> <li>▪ Pengembangan Program Kemitraan Antara Pemerintah Provinsi dengan Dunia Industri untuk Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja.</li> <li>▪ Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Bagi Pekerja Rentan agar dapat Memasuki Pasar Kerja.</li> <li>▪ Meningkatkan Aset Masyarakat Miskin Melalui Bedah Rumah dan Pemanfaatan Pekarangan.</li> <li>▪ Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin melalui Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar Berupa Air Bersih, Sanitasi, Bedah Rumah, Sarana Prasarana Kawasan Kumuh, Sarana Perdagangan untuk Orang Miskin, Sarana Industri Untuk Orang Miskin, dan Pemanfaatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>▪ Program Pengembangan Perumahan</li> <li>▪ Program Kawasan Permukiman</li> <li>▪ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li> <li>▪ Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>▪ Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>▪ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>▪ Program Penanganan Bencana</li> <li>▪ Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</li> <li>▪ Program Perencanaan Tenaga Kerja</li> <li>▪ Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>▪ Program Penempatan Tenaga Kerja</li> <li>▪ Program Hubungan Industrial</li> <li>▪ Program Pengawasan Ketenagakerjaan</li> <li>▪ Program Penataan Desa</li> <li>▪ Program Peningkatan Kerjasama Desa</li> <li>▪ Program Administrasi Pemerintahan Desa</li> <li>▪ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,</li> </ul>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		<p>Pekarangan (Benih dan Pupuk), Peningkatan Pemberdayaan SDA Lokal,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan <i>Lifeskill</i> Pemuda melalui Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Miskin.</li></ul>	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mengefektifkan Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Meningkatkan Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota dalam satu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).</li><li>▪ Mengoptimalkan Pusat Distribusi Regional (PDR).</li><li>▪ Intervensi Pemerintah terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan dalam Daerah Khususnya Beras, antara lain: Adanya Kebijakan Pemda yang Mengatur tentang Gapoktan yang Ada.</li><li>▪ Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam Provinsi dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Beberapa Komoditi Pangan.</li></ul>	
	Menurunkan Daerah Rawan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengembangan Desa Mandiri Pangan.</li><li>▪ Penanganan Daerah Rawan Pangan.</li><li>▪ Kawasan Rumah Pangan Lestari.</li><li>▪ Pengembangan Ternak di Daerah Pengentasan Kemiskinan.</li></ul>	
	Mengoptimalkan Peran Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan Peran Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan</li></ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	dan Konsultasi Kemiskinan	Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. <ul style="list-style-type: none"><li>Mengembangkan Program dan Inovasi Penanggulangan Kemiskinan.</li></ul>	
1.5 Meningkatkan Akses Energi ( <i>Maju Akses Energi</i> )	Mengoptimalkan pengembangan energi berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"><li>Melaksanakan Pengkajian dan Evaluasi Daerah yang tidak dilalui oleh Jaringan Listrik PLN dengan Meningkatkan Potensi Lokal Berbasis EBT.</li><li>Melakukan Koordinasi secara Komprehensif bersama Kabupaten/Kota Penghasil Gas untuk Menggalakkan Pemanfaatan Gas Rumah Tangga.</li><li>Memfasilitasi Proses Pengolahan dan Distribusi Kegiatan Pertambangan yang Berada dalam Koridor Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal.</li><li>Mendorong Perusahaan Energi dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Rangka Meminimalkan Kerusakan Lingkungan.</li><li>Penataan Pola Hubungan Ekonomi Antar Investor di Sektor Pertanian, Jasa, Pertambangan, dengan Masyarakat Lokal yang Mengedepankan Pendekatan Dialogis dan Partisipatif.</li><li>Pembangunan Industri Keenergian Kreatif yang berbasiskan Batubara di Tingkat Masyarakat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pengelolaan Aspek Kegeologian</li><li>Program Pengelolaan Mineral dan Batubara</li><li>Program Pengelolaan Energi Terbarukan</li><li>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</li></ul>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		<p>Lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Daerah agar Mampu Terlibat dalam Kegiatan Pertambangan dan Energi.</li> </ul>	

### Tabel

*Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada*

**Misi 2: “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas”.**

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
2.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat ( <i>Maju Kesehatan Masyarakat</i> )	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter mandiri, poskesdes, polindes, apotik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi Sarana dan Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Sanitasi).</li> <li>Meningkatkan Kapasitas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).</li> <li>Riset Berbasis Kebutuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</li> <li>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> </ul>
	Meningkatkan upaya promotif dan preventif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Upaya Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit.</li> <li>Membangun Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</li> </ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		(PHBS) Masyarakat Secara Partisipatif. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan.</li><li>▪ Peningkatan Ketersediaan, Distribusi serta Konsumsi dan Keamanan Pangan.</li><li>▪ Meningkatkan Kualitas Kabupaten/Kota Sehat.</li></ul>	
	Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan Mutu Posyandu.</li><li>▪ Meningkatkan Akses Balita dan Ibu Hamil Terhadap Makanan Bergizi, Berimbang Dan Beragam.</li><li>▪ Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Berbasis Kewilayahan.</li><li>▪ Meningkatkan Cakupan <i>Ante Natal Care</i> (ANC) Sesuai Standar (10 T).</li></ul>	
2.2 Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas ( <i>Maju Akses Pendidikan Berkualitas</i> )	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan terjangkau.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal di Setiap Jenjang.</li><li>▪ Mengoptimalkan Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Usia Produktif yang Masih Berpendidikan Rendah.</li><li>▪ Memotivasi Anak Usia Sekolah untuk Bersekolah.</li><li>▪ Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.</li><li>▪ Meningkatkan Pemenuhan, Distribusi dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li><li>▪ Meningkatkan Keterjangkauan Biaya Pendidikan.</li><li>▪ Mengefektifkan Keterlibatan Lembaga</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Program Pengelolaan Pendidikan</li><li>▪ Program Pengembangan Kurikulum</li><li>▪ Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li><li>▪ Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</li><li>▪ Program Pembinaan Perpustakaan</li><li>▪ Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</li></ul>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Pendidikan Berbasis Keagamaan untuk Pengembangan Potensi Lokal.	
	Revitalisasi SMK	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyediaan Guru Produktif.</li><li>▪ Penyediaan Sarana dan Prasarana (Alat Praktek).</li><li>▪ Pengembangan Kurikulum (<i>Link and Match</i> dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri).</li><li>▪ Pembentukan Lembaga-Lembaga Keterampilan/Pelatihan yang Terfokus pada Pengembangan Potensi Lokal.</li></ul>	
	Meningkatkan akses layanan perpustakaan terhadap masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan Jumlah Ketersediaan dan Kemerataan Bahan Bacaan di Berbagai Jenis Perpustakaan.</li><li>▪ Memudahkan Akses Terhadap Bahan Bacaan.</li><li>▪ Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.</li><li>▪ Meningkatkan Pemerataan dan Pemanfaatan Akses Layanan Perpustakaan di Masyarakat.</li><li>▪ Memfasilitasi Layanan Informasi Berbasis Internet di Seluruh Perpustakaan Desa/Kelurahan.</li><li>▪ Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Perpustakaan di Masyarakat.</li><li>▪ Penyebaran Pusat - Pusat Informasi di Ruang - Ruang Publik.</li></ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Jumlah dan Sebaran Tenaga Perpustakaan.</li> <li>Meningkatkan Fungsi Pembinaan Dalam Rangka Penguatan Sumber Daya Perpustakaan (SDM, Bahan Bacaan, Sarpras, Anggaran).</li> <li>Meningkatkan Promosi Penggunaan Perpustakaan.</li> </ul>	
	Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi bidang pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang Dan Inovasi Bidang Pendidikan.</li> </ul>	

### Tujuan 3 : Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
3.1 Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak ( <i>Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Implementasi Kebijakan Responsif Gender dan Anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan, Reviu, Harmonisasi Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Terpilah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>Program Perlindungan Perempuan</li> <li>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</li> <li>Program Pemenuhan Hak Anak</li> <li>Program Perlindungan Khusus Anak</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sinergi pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan, Review, Harmonisasi Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Terpilah.</li> <li>Peningkatan Pemahaman, Komitmen, serta Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, Akademisi,</li> </ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	<p>Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Tentang Pembangunan Responsif Gender, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peningkatan Kelembagaan Terkait Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Gender dan Anak.</li><li>▪ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada berbagai Lembaga Terkait Pembangunan Gender, Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Data Gender dan Anak Serta Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.</li><li>▪ Peningkatan Pembangunan Kualitas Keluarga.</li><li>▪ Pembinaan Kepada Organisasi Perempuan serta Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.</li><li>▪ Peningkatan Motivasi, Pengetahuan dan Keterampilan Perempuan untuk Berkiprah dalam Berbagai Sektor Pembangunan.</li><li>▪ Peningkatan Kapasitas/ Pelatihan Kepemimpinan bagi Perempuan Khususnya Calon Legislatif (Caleg), Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Organisasi Perempuan.</li><li>▪ Peningkatan Kerjasama</li></ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		<p>dengan berbagai Stakeholders Melalui Perjanjian Kerjasama, MoU, dan Keterlibatan Stakeholders Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Keterampilan, Manajemen Usaha dan Bantuan Alat untuk Para Perempuan yang Membutuhkan.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).</li> <li>Pendampingan Teknis Kepada Pokja PUG Kab/Kota dan <i>Focal Point</i> OPD Provinsi.</li> <li>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Paham PUG.</li> <li>Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan Data Terpilah pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Kelembagaan KLA.</li> <li>Pendampingan Teknis Kepada Kabupaten/Kota Menuju Provinsi Layak Anak (Provila).</li> <li>Pelaksanaan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Indikator KLA.</li> <li>Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan</li> <li>Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan Data Anak pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).</li> </ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak melalui pengoptimalan usaha pencegahan dan penanganan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendidikan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Termasuk TPPO.</li> <li>▪ Sosialisasi, Advokasi, Desiminasi terkait Pemenuhan Hak Perempuan pada Berbagai Situasi (Tenaga Kerja, Lansia, Perempuan Termarginalkan/Minoritas, termasuk Dalam Situasi Bencana)</li> <li>▪ Pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sesuai SOP.</li> <li>▪ Peningkatan SDM Petugas Pelayanan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.</li> <li>▪ Sistem Pelayanan yang Komprehensif bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.</li> <li>▪ Peningkatan Koordinasi Jejaring Lembaga yang Menangani Kasus Perempuan dan Anak.</li> <li>▪ Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).</li> <li>▪ Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan Data Kekerasan Perempuan dan Anak (Simfoni).</li> </ul>	

### Tabel

*Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada Misi III*

**Misi 3: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas**



**yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif”.**

Tujuan 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
4.1 Meningkatkan Pelayanan Publik Berkualitas ( <i>Maju Pelayanan Publik Berkualitas</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan pelayanan publik yang terpadu, cepat, mudah dan inklusif (mengakomodir kelompok masyarakat berkebutuhan khusus).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Publik.</li> <li>Mendorong Pengutamaan Kepentingan Publik oleh Pelayanan Publik dengan Pelayanan Birokrasi yang Berbasis <i>Information and Technology</i> (IT).</li> <li>Revitalisasi Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pelayanan Publik.</li> <li>Menempatkan Petugas Pelayanan yang Kompeten (<i>Right Man in The Right Place</i>) dan Menciptakan Perilaku Pelaksana/Petugas dengan Memberikan Pelayanan secara Sopan, Ramah serta saling Menghargai dan Menghormati.</li> <li>Membangun Jaringan Interkoneksi Layanan Publik yang Bersifat Lintas Kabupaten/Kota, yang bisa di Akses oleh Publik Secara <i>Online</i> 24 Jam/Hari, 7 Hari/Minggu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</li> <li>Program Pendaftaran Penduduk</li> <li>Program Pencatatan Sipil</li> <li>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</li> <li>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</li> <li>Program Penelitian dan Pengembangan</li> <li>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan.</li> </ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	efektif	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Dalam Pelayanan Publik Menuju <i>Cyber Province</i></li><li>▪ Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</li><li>▪ Peningkatan Pengelolaan Satu Data Pembangunan.</li><li>▪ Membangun Hubungan Administrasi Pemerintah yang Lebih Harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumsel sebagai Bagian dari Proses Reformasi Birokrasi.</li><li>▪ Memfasilitasi Forum Kepala Daerah se-Sumatera Selatan dengan Menjadwalkan Pertemuan Rutin dalam Jangka Waktu Tertentu.</li><li>▪ Melakukan Kunjungan ke Semua Daerah Secara Berkala untuk Penyerapan Aspirasi dan Mendorong Keunggulan Potensi Masyarakat.</li></ul>	
	▪ Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Riset Berbasis Kebutuhan.</li><li>▪ Meningkatkan Kualitas SDM Peneliti.</li><li>▪ Melakukan Koordinasi dengan Pembuat Kebijakan dan Pelaku Bisnis.</li></ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi.</li> <li>Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang dan Inovasi.</li> </ul>	
4.2 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas ( <i>Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi Penganggaran, Perbendaharaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Akuntansi Pelaporan yang Baik.</li> <li>Implementasi Aplikasi yang Mengintegrasikan Perencanaan dengan Penganggaran yaitu E-Sumsel.</li> <li>Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah untuk Pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li> <li>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</li> <li>Program Pengelolaan Arsip</li> <li>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</li> <li>Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</li> <li>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan Institusi Pendidikan Tinggi di Daerah sebagai <i>Think Tank</i> Pembangunan Daerah.</li> <li>Menjadikan Lembaga Pers dan Media Massa sebagai Mitra Pembangunan Daerah.</li> <li>Melibatkan Unsur LSM/Ormas dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan oleh Lembaga Pemerintahan.</li> <li>Menempatkan Posisi Semua Stakeholder (Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera Selatan dalam Satu</li> </ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		<p>Kepentingan Pembangunan Sumatera Selatan Maju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Berbagai Sumber Pendanaan yang Ada.</li> <li>▪ Mengundang Peraturan Daerah yang Menekankan Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Setempat.</li> </ul>	
<p>4.3 Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (<i>Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan integritas ASN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah di Semua Bidang.</li> <li>▪ Mengoptimalkan Pengawasan Melekat.</li> <li>▪ Mendorong Masyarakat Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Kinerja Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>).</li> <li>▪ Meningkatkan Tunjangan ASN Berbasis Kinerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Penataan Organisasi</li> <li>▪ Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</li> <li>▪ Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi</li> <li>▪ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</li> <li>▪ Program Kepegawaian Daerah</li> <li>▪ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>▪ Program Pengelolaan Penghubung</li> <li>▪ Penyelenggaraan Pengawasan</li> <li>▪ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</li> </ul>

### **Tabel**

*Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada Misi IV*

**Misi 4: “Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar**



**arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah”.**

Tujuan 5 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
5.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup ( <i>Maju Kualitas Lingkungan Hidup</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup meliputi Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Hutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan Kualitas Air dan Udara.</li> <li>Meningkatkan Program Perhutanan Sosial.</li> <li>Meningkatkan Program Pengamanan Hutan.</li> <li>Meningkatkan Kegiatan Identifikasi Permasalahan dalam Kawasan Hutan.</li> <li>Pengendalian Kebakaran Hutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> <li>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li> <li>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>Program Penanggulangan Bencana</li> <li>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</li> <li>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</li> <li>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li> <li>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunkan emisi GRK di 6 sektor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM.</li> <li>Revitalisasi Karet dan Sawit yang Berkelanjutan.</li> <li>Meningkatkan Kemampuan Masyarakat untuk Mengelola dan Mendaur Ulang Sampah Menjadi Sumber Ekonomi Baru.</li> <li>Mengembangkan Energi Baru Terbarukan Berbasis Potensi Daerah.</li> <li>Rehabilitasi Lahan.</li> <li>Penggunaan Bibit Pertanian yang Ramah Lingkungan.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, dan</li> <li>Peningkatan Upaya</li> </ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	n hidup	Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pesisir dan Laut. <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li> <li>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li> <li>Program Pengelolaan persampahan</li> <li>Program Pengelolaan Hutan</li> <li>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</li> <li>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</li> <li>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan mitigasi bencana, mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Sistem <i>Early Warning</i> dan Sistem Penanganan Bencana.</li> <li>Meningkatkan System Monitoring dan Informasi Bencana.</li> <li>Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Air disemua Sektor dan Memastikan Keberlangsungan Pengambilan dan Pasokan Air Baku untuk Mengatasi Kelangkaan Air.</li> <li>Meningkatkan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana.</li> <li>Meningkatkan Kecepatan Penanganan Bencana.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perwujudan Harmonisasi dalam Pemanfaatan, Penataan dan Pengendalian Ruang pada seluruh Kawasan Strategis Provinsi</li> <li>Peningkatan Kinerja Perencanaan Ruang.</li> <li>Peningkatan Kinerja Pemanfaatan Ruang.</li> <li>Peningkatan Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li> </ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	berkelanjutan dan berdayasaing		
5.2 Meningkatkan Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas ( <i>Maju Infrastruktur dan Konektivitas</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Jalan dan Jembatan untuk Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat</li> <li>Meningkatkan Aksesibilitas Darat, Sungai, Udara, dan Laut.</li> <li>Menciptakan Pembangunan yang Selaras dengan Kondisi Kewilayahan yang didukung Tersedianya Infrastruktur yang dapat Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah.</li> <li>Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Industri Pertambangan Batubara.</li> <li>Pengembangan Sistem Teknologi Baru dalam Efektifitas Sistem Transportasi Batubara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penataan Bangunan Gedung</li> <li>Program Penataan bangunan dan lingkungannya</li> <li>Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>Program Pengelolaan Izin Lokasi</li> <li>Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</li> <li>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</li> <li>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</li> <li>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li> <li>Program Pengelolaan Pelayaran</li> <li>Program Pengelolaan Perkeretaapian</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Minum.</li> <li>Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik.</li> <li>Peningkatan Cakupan Layanan Persampahan.</li> <li>Peningkatan Ketersediaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li> <li>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</li> <li>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</li> <li>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</li> </ul>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Drainase Perkotaan, dan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan Lingkungan Permukiman Sehat.</li> <li>▪ Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.</li> <li>▪ Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung/Rumah Negara.</li> </ul>	

### Tabel

*Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada Misi V*

**Misi 5: “Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius”.**

Tujuan 6 : Terwujudnya Masyarakat Madani

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
6.1 Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan kehidupan beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan Kemampuan Aparat Hukum (Penegak Perda/Satpol PP dan PPNS) Melalui Pelatihan dan Pembekalan Aparat Penegak Perda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> <li>▪ Program Kesejahteraan Rakyat</li> <li>▪ Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> </ul>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
yang berkualitas ( <i>Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama</i> )		<p>(Satpol PP dan PPNS) untuk Meningkatkan Kinerja Aparat Penegak Perda).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menertibkan Administrasi Maupun Teknis dalam Pelaksanaan Penegakan Perda.</li> <li>▪ Mengoptimalkan Pencegahan untuk Mengurangi Pelanggaran Perda dengan Melakukan Sosialisasi, Pembinaan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum.</li> <li>▪ Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Baik Internal Maupun Eksternal.</li> <li>▪ Optimalisi Peranan Tim Penegakan Perda Bersama Tim Terkait.</li> <li>▪ Meningkatkan Penanganan Bencana (Tanggap Darurat).</li> <li>▪ Meningkatkan Upaya Penyelesaian Sengketa Lahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</li> <li>▪ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>▪ Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</li> <li>▪ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengoptimalkan Upaya Pencegahan Konflik Sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan Pendidikan Budaya Politik di Masyarakat dan Parpol.</li> <li>▪ Memfasilitasi Semua Aktifitas Lembaga Kebudayaan dan Keagamaan untuk Berpartisipasi dalam Membangun Penguatan Toleransi dalam Kehidupan bermasyarakat.</li> <li>▪ Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah</li> </ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		<p>Air.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pengembangan dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong penguatan pengetahuan, sikap, dan praktek keagamaan masyarakat agar terbentuk masyarakat madani dan religius.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Kualitas Kerukunan Beragama.</li> <li>Memfasilitasi Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan.</li> <li>Mewujudkan Satu Desa Satu Rumah Tahfidz.</li> <li>Mendorong Penguatan Pengetahuan, Sikap, dan Praktek Keagamaan Masyarakat agar Terbentuk Masyarakat Madani dan Religius.</li> </ul>	

Tujuan 7 : Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah melalui Seni, Budaya, dan Religi

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
7.1 Meningkatkan Seni, Budaya, dan Pariwisata ( <i>Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan daya saing pariwisata untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan Obyek Daya Tarik Wisata Religi, <i>Sport Tourism</i> dan Wisata Alam Potensial.</li> <li>Peningkatan Aksesibilitas Khususnya Infrastruktur Jalan Menuju Objek dan Daya Tarik Wisata dan Jaringan Internet, Peningkatan Amenitas Higiene dan Sanitasi.</li> <li>Peningkatan Atraksi/Daya Tarik Wisata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Kebudayaan</li> <li>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</li> <li>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</li> <li>Program Pengelolaan Permuseuman</li> <li>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> </ul>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengembangan Pemasaran (<i>Branding, Advertising Dan Selling</i>).</li><li>▪ Pengembangan Kapasitas SDM, Diklat dan Sertifikasi Profesi serta Usaha Pariwisata.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peningkatan Aset Budaya Lokal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mengefektifkan Program Sriwijaya 2020.</li><li>▪ Revitalisasi Museum dan Aset Budaya Lokal.</li><li>▪ Reinventing Budaya Lokal dan Pengetahuan Lokal dalam Membangun Identitas Kultural Masyarakat.</li><li>▪ Mendorong Memajukan Bahasa Lokal sebagai Kekayaan Khas Budaya Sumatera Selatan.</li><li>▪ Membangun Akses Ruang-Ruang Kreatif, Seni dan Budaya yang Mampu Menciptakan Ruang Publik yang Berbudaya di Seluruh Wilayah Sumsel.</li><li>▪ Menjamin Kebebasan untuk Mengembangkan dan Mengekspresikan Seni Budaya Masing-Masing di Daerah Sumatera Selatan.</li><li>▪ Mendorong Budaya Lokal dan Pengetahuan Lokal Kedalam Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah-Sekolah sebagai Proses</li></ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		<p>Pengembangan Budaya Lokal yang dapat Berkontribusi dalam Membangun Karakter Bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Kemampuan Peserta Melalui Pembinaan oleh Pelatih Qasidah.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riset Berbasis Kebutuhan.</li> <li>Meningkatkan Kualitas SDM Peneliti.</li> <li>Melakukan Koordinasi dengan Pembuat Kebijakan dan Pelaku Bisnis.</li> <li>Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi.</li> <li>Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang dan Inovasi.</li> </ul>	

### Tujuan 8 : Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
8.1 Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga ( <i>Maju Pemuda dan Olahraga</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Prestasi Atlit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memanfaatkan Fasilitas Olahraga dan Pembinaan yang Berkelanjutan.</li> <li>Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Keolahragaan melalui Pelatihan maupun Kursus.</li> <li>Pemassalan Olahraga dikalangan Masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> <li>Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</li> <li>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong Program-Program Kepemudaan Yang Kreatif Dan Inovatif Di Berbagai Bidang.</li> <li>Mengembangkan Sistem Penghargaan</li> </ul>	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	<p>unan (Akademis , Seni, Budaya, Olahraga dan Wirausah a Muda)</p>	<p>Terhadap Capaian Prestasi Pemuda Di Bidang Seni, Olahraga, Budaya, Dan Akademis. ▪ Meningkatkan Jumlah Kabupaten/Kota Layak Pemuda.</p>	

### Prioritas Daerah

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan arahan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, RKP tahun 2023, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Isu Strategis yang kemudian ditetapkan ke dalam tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yaitu **“Sumsel Maju Untuk Semua”** dengan beberapa Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
3. Pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang
4. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah

Setiap Prioritas Daerah tersebut dijabarkan menjadi beberapa Program Prioritas Daerah yang selanjutnya didukung oleh sejumlah Program, Kegiatan, dan SubKegiatan pada seluruh Perangkat Daerah yang disajikan dalam tabel berikut.

### Tabel

Penjabaran Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kesejahteraan	1. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Disnakertrans



No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Sosial	2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. DPPPA		
		3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin	1. Dinas Sosial		
			2. DPMPD		
			3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		
		4. Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan	1. Dinas pendidikan		
			2. Dinas Perpustakaan		
			3. Dispora		
		5. Peningkatan Penguatan Sistem Kesehatan	1. Dinas Kesehatan		
			2. RS. Ernaldi Bahar		
			3. RS. Mata		
			4. RS. Paru-Paru		
			5. RS. Gigi dan Mulut		
6. Peningkatan Akses Terhadap Infrastruktur Dasar	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan				
	2. Disperkim				
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	1. Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	1. Dinas Pertanian TPH		
			2. Dinas Perkebunan		
			3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		
			4. Dinas Kelautan dan Perikanan		
			5. Dinas Kehutanan		
			6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
		2. Peningkatan Sektor Industri Pengolahan Daerah Berbasis Sektor Unggulan	1. Dinas Perindustrian		
			2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
		3. Pengendalian Inflasi Daerah	1. Dinas Perdagangan		
			2. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		
			3. Dinas Kelautan dan Perikanan		
			4. Dinas Sosial		
		4. Peningkatan Pertumbuhan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM Daerah	1. Dinas Koperasi dan UKM		
		5. Peningkatan Industri Pariwisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
			2. Disperkim		
		6. Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	1. DPMPPTSP		
		3.	Pembangunan Infrastruktur	1. Peningkatan Infrastruktur Konektivitas	1. Dinas Perhubungan
					2. Dinas PU BM



No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang		3. BPKAD
		2. Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1. Dinas PSDA
		3. Penurunan Kejadian Kebakaran Hutan Dan Lahan	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		4. Meningkatnya Komunikasi. Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana	1. BPBD
		5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
4.	Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	1. BPKAD
			2. Bapenda
			3. Inspektorat
			4. Badan Peghubung
			5. Bappeda
			6. Biro Otonomi
			7. Biro Perekonomian
			8. Biro Adm. Pembangunan
			9. Biro Organisasi
			10. Biro Umum dan Perlengkapan
		2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Badan Kesbangpol
			2. Balitbangda
			3. Sekretariat DPRD
			4. Biro Hukum
			5. Biro Kesra
3. Peningkatan Kapabilitas Birokrasi	6. Biro PBJ		
	7. Disdukcapil		
	8. Satpol PP		
	9. Dinsos		
		10. Balitbangda	11. Biro Humas dan Protokol
		1. BKD	
		2. BPSDMD	
		3. Dinas Kearsipan	
		4. Diskominfo	



### **Data Geografis Wilayah**

Pada Tahun 1950 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan telah dibentuk Provinsi Otonomi Sumatera Selatan, yang wilayahnya meliputi Daerah Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka Belitung dengan Ibukotanya berkedudukan di Kota Palembang.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tanggal 26 Juni 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang.

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1°-4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur Timur dengan batas administrasi:

- a. Di sebelah Utara dengan Provinsi Jambi.
- b. Di sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung
- c. Di sebelah Timur dengan Provinsi Bangka Belitung
- d. Di sebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu.

Adapun peta administrasi Provinsi Sumatera Selatan seperti tertera pada gambar berikut :



**Gambar**  
**Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan**



Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 86.771.684 Km<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu	3.774.497 Km <sup>2</sup>
2. Kabupaten Ogan Komering Ilir	17.071.333 Km <sup>2</sup>
3. Kabupaten Muara Enim	6.763.912 Km <sup>2</sup>
4. Kabupaten Lahat	4.333.065 Km <sup>2</sup>
5. Kabupaten Musi Rawas	6.122.588 Km <sup>2</sup>
6. Kabupaten Musi Banyuasin	14.550.788 Km <sup>2</sup>
7. Kabupaten Banyuasin	12.262.756 Km <sup>2</sup>
8. Kabupaten OKU Timur	3.412.716 Km <sup>2</sup>
9. Kabupaten OKU Selatan	4.369.252 Km <sup>2</sup>
10. Kabupaten Ogan Ilir	2.302.858 Km <sup>2</sup>
11. Kabupaten Empat Lawang	2.234.097 Km <sup>2</sup>
12. Penukal Abab Lematang Ilir	1.842.563 Km <sup>2</sup>
13. Kabupaten Muratara	5.937.803 Km <sup>2</sup>



14. Kota Palembang	352.506 Km <sup>2</sup>
15. Kota Pagar Alam	625.913 Km <sup>2</sup>
16. Kota Lubuk Linggau	367.726 Km <sup>2</sup>
17. Kota Prabumulih	447.311 Km <sup>2</sup>

Kawasan timur sampai garis pantai bagian daratan di dominisasi rawa-rawa dan lebak yang dipengaruhi pasang surut. Di bagian tengah dan makin ke barat merupakan dataran rendah dan lembah-lembah luas. Bagian Barat Sumatera Selatan terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang merupakan mata rantai dari Bukit Barisan yang membentang di Pulau Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung. Puncak-puncak Bukit Barisan di Sumatera Selatan diantaranya adalah Gunung Dempo (3,159 M) Gunung Seminung (1.954 M), Gunung Patah (2.107 M), Gunung Bungkok (2.125 M). Di kaki Gunung Seminung terdapat Danau Ranau yang luasnya 128 km<sup>2</sup> dengan panorama alam yang indah dan juga ideal untuk olahraga air seperti ski, menyelam, renang dan kano. Kawasan pegunungan dan perbukitan tersebut sebagian besar masih diselimuti hutan lebat sampai ke dataran rendah, umumnya berada pada ketinggian 900-1.200 M di atas permukaan laut. Kawasan ini juga merupakan sumber mata air utama dari sungai-sungai besar di Sumatera Selatan yang sebagian besar bermuara di Selat Bangka.

#### **a. Jumlah Penduduk**

Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86.771.684 Km<sup>2</sup> didiami penduduk pada tahun 2023 sebanyak 8.889.913 jiwa. Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86.771.684 Km<sup>2</sup> didiami penduduk pada tahun 2023 semester II (31 Desember 2023) sebanyak 8.889.913 jiwa. Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :



<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>LUAS WILAYAH KM2</b>
1	OGAN KOMERING ULU	3.774.497
2	OGAN KOMERING ILIR	17.071.333
3	MUARA ENIM	6.763.912
4	LAHAT	4.333.065
5	MUSI RAWAS	6.122.588
6	MUSI BANYUASIN	14.550.788
7	BANYUASIN	12.262.756
8	OKU TIMUR	3.412.716
9	OKU SELATAN	4.369.252
10	OGAN ILIR	2.302.858
11	EMPAT LAWANG	2.234.097
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1.842.563
13	MUSI RAWAS UTARA	5.937.803
14	PALEMBANG	352.506
15	PAGAR ALAM	625.913
16	LUBUK LINGGAU	447.311
17	PRABUMULIH	447.311

#### **b. Jumlah Kabupaten/Kota**

Penduduk ini tersebar di 17 Kabupaten / Kota, 241 Kecamatan dan 3.258 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kota Palembang sebanyak 1.772.492 Jiwa, sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Pagar Alam yaitu sebanyak 150.881 Jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 4.526.862 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.363.051 jiwa sebagaimana tertera pada tabel dibawah :



REKAPITULASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK-2)  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER II (31 DESEMBER 2023)  
PER KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PENDUDUK			DATA KELUARGA
				LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	196,328	187,280	383,608	116,565
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	400,607	379,286	779,893	257,200
3	MUARA ENIM	22	255	326,519	313,705	640,224	198,899
4	LAHAT	24	378	225,756	216,205	441,961	137,139
5	MUSI RAWAS	14	199	215,276	206,235	421,511	134,084
6	MUSI BANYUASIN	15	242	362,877	344,413	707,290	222,018
7	BANYUASIN	21	313	434,753	415,269	850,022	274,061
8	OKU TIMUR	20	312	350,191	334,369	684,560	216,710
9	OKU SELATAN	19	259	218,934	202,070	421,004	126,141
10	OGAN ILIR	16	241	222,549	216,920	439,469	135,495
11	EMPAT LAWANG	10	156	173,964	162,730	336,694	107,919
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	106,277	103,494	209,771	63,201
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	101,481	98,187	199,668	62,295
14	PALEMBANG	18	107	887,101	885,391	1,772,492	533,084
15	PAGAR ALAM	5	35	77,147	73,734	150,881	45,952
16	LUBUK LINGGAU	8	72	121,877	120,017	241,894	74,375
17	PRABUMULIH	6	45	105,225	103,746	208,971	62,730
	<b>JUMLAH</b>	<b>241</b>	<b>3,258</b>	<b>4,526,862</b>	<b>4,363,051</b>	<b>8,889,913</b>	<b>2,767,868</b>

Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri



## 1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**

Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)*
1	Indeks Pembangunan Manusia	72.48	73.18	0.966%
2	Angka Kemiskinan	11.9	11.78	-1.008%
3	Angka Pengangguran	4.63	4.11	-11.231%
4	Pertumbuhan Ekonomi	343.46	360.91	5.081%
5	Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita ADHB)	68.24	71.95	5.437%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.339	0.338	-0.295%

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

### Keterangan:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi nama indikator kinerja makro
- Kolom (3) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun sebelumnya
- Kolom (4) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun pelaporan
- Kolom (5) diisi dengan persentase perubahan capaian kinerja makro,



## 2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas = 394.418.  Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan = 416.276	94,75	
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus = 3.067  Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan = 10.414	29,45	
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi = 8902.  Jumlah Penduduk provinsi = 8.889.913.	0,10	



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi = 4  Jumlah RS provinsi = 4	100	
1.b.3	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun = 59.900  Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana = 59.900	100	
1.b.4	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar = 89.740  Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB = 89.740	100	
1.c.1.1	PU dan PR	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 0  Luas kawasan permukiman rawan	0	



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
			banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 1.		
1.c.1.2	PU dan PR	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan provinsi (m) = 0  Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m) = 1	0	
1.c.2	PU dan PR	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 51.385  luas daerah irigasi kewenangan provinsi = 91.050	56,44	
1.c.3	PU dan PR	Persentase kapasitas yang dapat terlayani	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum	0	



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
		melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	curah lintas kabupaten/kota = 0.  Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan. = 1.		
1.c.4	PU dan PR	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional = 0.  Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional = 1	0	
1.c.5	PU dan PR	Rasio kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap = 1.568.430  Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi = 1.779,27	88,15	
1.c.6	PU dan PR	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli = 212.  jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi = 279	75,98	



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
1.d.1	Perkim	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun $n = 0$  Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun $n = 1$ .	0	
1.d.2	Perkim	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 2  Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 2	100	
1.d.3	Perkim	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 &ndash; 15 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani = 76.902  Luas kawasan kumuh 10-15 Ha = 687.600	11,18	
1.d.4	Perkim	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 251  Jumlah satuan perumahan = 1.681	14,93	



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan = 36.  Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 36	100	
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 20.  Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 20	100	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun = 6  Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun = 6.	100	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana = 17.  Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi = 17	100	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana = 17.  Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana = 17	100	
1.f.1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 20.	100	



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
		dalam panti	Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 20.		
1.f.2	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 130.  Jumlah Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 130	100	
1.f.3	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 200.  Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 200.	100	
1.f.4	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 180.  Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial	100	



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
			dasar di dalam panti = 180.		
1.f.5	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 7.496  Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi = 7.496.	100	

### 3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintah daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terbagi dalam tiga kategori yakni rendah, tinggi dan sangat tinggi. EPPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 terhadap LPPD tahun 2022 memperoleh skor 3.18 dengan status kinerja sedang, EPPD tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2023 memperoleh skor 3.4811 dengan status kinerja Tinggi



#### **4. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya**

Untuk Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan realisasinya adalah belum ada dikarenakan masih dalam proses pengauditan. Nilai WTP baru dikeluarkan oleh BPK pada bulan Maret, karena saat ini masih dalam proses audit dari pihak BPK.

Di Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berusaha untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan cara:

- Menindaklanjuti temuan-temuan BPK.
- Memperkuat sistem pengendalian dalam pengelolaan keuangan.
- Penyajian Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan, workshop dan sosialisasi.
- Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- Dilaksanakannya reviu terhadap Laporan Keuangan oleh Inspektorat Provinsi yang di damping Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan melakukan usaha-usaha diatas, maka dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 yang dikeluarkan oleh BPK-RI memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Capaian Kinerja Opini BPK Tahun 2023 dengan target kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 mendapat nilai WTP dari tahun 2019 s.d 2022 tetapi untuk tahun 2023 masih dalam proses Audit BPK.

a. Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pelaporan Keuangan yang Baik

Opini Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Bahwa Sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Saat ini, Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dalam proses Audit BPK.

**Opini BPK Tahun 2022**

Opini Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bahwa Sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Saat ini, Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dalam proses Audit BPK.



## 5. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah

**Tabel**  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>11,100,410,477,130.00</b>	<b>9,868,665,138,104.89</b>	<b>88.90</b>	<b>10,036,955,961,132.70</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5,537,652,151,975.00</b>	<b>5,197,288,200,424.89</b>	<b>93.85</b>	<b>4,930,954,855,677.74</b>
Pendapatan Pajak Daerah	4,355,163,819,899.00	4,649,358,915,256.16	106.76	4,461,152,465,008.25
Pendapatan Retribusi Daerah	11,273,357,173.00	13,174,754,856.40	116.87	12,185,155,716.25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	160,133,041,509.00	223,885,947,856.26	139.81	153,032,882,582.11
Lain-Lain PAD yang Sah	1,011,081,933,394.00	310,868,582,456.07	30.75	304,584,352,371.13
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5,558,875,638,479.00</b>	<b>4,667,494,251,004.00</b>	<b>83.96</b>	<b>5,090,093,999,526.00</b>
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5,558,875,638,479.00	4,667,494,251,004.00	83.96	5,029,223,442,526.00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>3,882,686,676.00</b>	<b>3,882,686,676.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,907,105,929.00</b>
Hibah	3,882,686,676.00	3,882,686,676.00	100.00	15,907,105,929.00
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11,207,592,376,605.00</b>	<b>9,684,530,238,251.08</b>	<b>86.41</b>	<b>9,663,575,726,750.69</b>
<b>OPERASI</b>	<b>5,453,521,856,392.00</b>	<b>4,944,283,099,803.87</b>	<b>90.66</b>	<b>4,499,276,793,174.07</b>
Pegawai	2,402,455,359,047.00	2,158,618,753,463.00	89.85	2,092,571,068,579.00
Barang dan Jasa	2,585,947,355,847.00	2,328,889,597,105.87	90.06	2,042,275,862,382.07
Bunga	9,000,000,000.00	8,817,133,280.00	97.97	13,227,699,524.00
Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
Hibah	456,119,141,498.00	447,957,615,955.00	98.21	351,202,162,689.00
Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MODAL</b>	<b>1,458,852,226,079.00</b>	<b>1,239,942,602,394.99</b>	<b>84.99</b>	<b>1,536,370,414,095.28</b>
Tanah	4,022,134,941.00	1,743,753,503.00	43.35	8,708,743,955.00
Peralatan dan Mesin	411,097,622,243.00	363,526,584,860.00	88.43	342,811,302,542.00
Gedung dan Bangunan	315,507,130,559.00	266,557,237,915.12	84.49	361,568,165,909.82
Jalan, Irigasi dan Jaringan	656,331,548,359.00	541,178,479,003.87	82.46	747,812,255,898.46
Aset Tetap Lainnya	68,849,789,977.00	65,940,480,613.00	95.77	75,469,945,790.00
Aset Lainnya	3,044,000,000.00	996,066,500.00	32.72	0.00
<b>TIDAK TERDUGA</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,553,804,801.00</b>
Tidak Terduga	5,000,000,000.00	0.00	0.00	19,553,804,801.00
<b>TRANSFER, BANTUAN KEUANGAN, DAN BAGI HASIL</b>	<b>4,290,218,294,134.00</b>	<b>3,500,304,536,052.22</b>	<b>81.59</b>	<b>3,608,374,714,680.34</b>
Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	2,219,612,517,208.00	2,179,118,758,571.00	98.18	1,914,984,234,446.00
Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2,070,605,776,926.00	1,321,185,777,481.22	63.81	1,693,390,480,234.34
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(107,181,899,475.00)</b>	<b>184,134,899,853.81</b>	<b>(171.80)</b>	<b>373,380,234,382.05</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>107,181,899,475.00</b>	<b>(62,909,800,649.81)</b>	<b>(58.69)</b>	<b>(50,463,191,908.86)</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>322,917,042,473.00</b>	<b>322,922,821,755.19</b>	<b>100.00</b>	<b>151,894,033,565.14</b>
Pergunaan SILPA Tahun Sebelumnya	322,917,042,473.00	322,922,821,755.19	100.00	79,713,949,495.59
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	72,180,084,069.55
Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0.00	0.00	0.00	0.00
Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>215,735,142,998.00</b>	<b>385,832,622,405.00</b>	<b>178.85</b>	<b>202,357,225,474.00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal/Investasi Daerah	0.00	0.00	0.00	202,357,225,474.00
Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Daerah Lain	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bank	215,735,142,998.00	385,832,622,405.00	178.85	0.00
Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Pinjaman - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0.00</b>	<b>121,225,099,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,917,042,473.19</b>
<b>RASIO KEMANDIRIAN</b>		<b>53%</b>		

Data Belum Audit BPK



## 6. Inovasi Daerah

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Daftar inovasi Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

No	Judul Inovasi	Admin OPD	Bentuk Inovasi
1	UPTB TRAUMA CENTER & PELAYANAN KESEHATAN BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan (bpbd.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
2	SIMPUL – RS ERBA (Sistem Informasi Publikasi Laporan Berbasis Elektronik RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan)	Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumsel (rserba.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
3	Pembuatan Shampoo Seledri Mint	SMA/SMK Kota Prabumulih (dinaspendidikanprabumulih.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
4	Si Emen (Sistem Informasi Elektronik Rekrutment)	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
5	OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN PASIEN MENGGUNAKAN PENDAFTARAN BERBASIS ONLINE	Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumsel (rserba.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
6	GERAK LANGKAH MENUJU PELAYANAN PRIMA	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
7	SISTEM INFORMASI BARANG PERSEDIAAN (SI BAPER)	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
8	PERAN AGENT DALAM MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN APLIKASI SUMSEL TANGGAP 119	Dinas Kesehatan Sumatera Selatan (dinaskesehatan.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
9	PEMBANGUNAN APLIKASI e LANG MUSI DALAM OPTIMALISASI PENGAWASAN PADA BAPENDA PROV SUMATERA SELATAN	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
10	SI JADA (Sistem Informasi Jatuh Tempo Pajak Kendaraan)	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik



11	E-DIKLAT (PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PELATIHAN)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sumatera Selatan (bpsdmd.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
12	SKANPOL ( Wipol Aroma Sereh )	SMA/SMK Kota Prabumulih (dinaspendidikanprabumulih.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
13	Ngoprek Material Bekas Menjadi Seni Terapan	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
14	Alat Ukur Kesuburan Tanah Sederhana	SMA/SMK Kabupaten Lahat (dinaspendidikanlahat.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
15	ES NANGKA MERAH	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
16	APLIKASI MARKETPLACE SIBEJAJO	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumsel (dinas pertanian.holtikultura.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
17	ROSELLA ICE CREAM AND JAM	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
18	Upaya Peningkatan Minat Belajar Siswa Pada Pandemi Melalui Media Zoom	SMA/SMK Kabupaten Lahat (dinaspendidikanlahat.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
19	Ujian Sekolah Berbasis Android di SMA Negeri 1 Tanjung Sakti PUMI	SMA/SMK Kabupaten Lahat (dinaspendidikanlahat.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
20	Penggunaan Aplikasi Canva-Edu untuk Pembelajaran Masa Kini Agar Tercipta Pola Interaksi Yang Menarik Dan Interaktif	SMA/SMK Kabupaten Lahat (dinaspendidikanlahat.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
21	SAI (Sumsel Awareness Investment)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan (dinasptsp.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
22	PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING SECARA ONLINE DARI RUMAH (PELAKOR) DALAM PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN PUZZEL DUNIA KERJA	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
23	Si-Biogas Orasi (Sistem Biogas untuk Pengolahan Kotoran Sapi)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi pelayanan publik



24	PELAKSANAAN INTERNASIONAL DESSERT DENGAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
25	MINI BAZAR ENTREPRENEUR PKWU WIRUSAHA MAKANAN KHAS DAERAH YANG DIMODIFIKASI	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
26	SITOKI (Sistem Informasi Jatuh Tempo Kendaraan)	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
27	MINI DIORAMA DI KELAS SEJARAH	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
28	POHON KARIR SALAH SATU ALAT BELAJAR SECARA ONLINE (PKSABO) MEDIA BIMBINGAN KONSELING UNTUK MASA DEPAN SISWA	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
29	PENGEMBANGAN BUDIDAYA LEBAH APIS MELLIFERA	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel (dinaskehutanan.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
30	APLIKASI ELEKTRONIK PAJAK AIR PERMUKAAN (e PAP)	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
31	DODOL KELUMBI	SMA/SMK Kabupaten PALI (dinaspendidikanpali.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
32	JAJAN ONLINE	SMA/SMK Kabupaten PALI (dinaspendidikanpali.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
33	BELAJAR ANEKDOT DENGAN STAND UP KOMEDI	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
34	Daur Ulang Sampah Plastik (Botol Aqua) menjadi Meja	SMA/SMK Kabupaten MURA (dinaspendidikanmura.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
35	SI JASPEL (Sistem Informasi Jasa Pelayanan)	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatimah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
36	Koperasi Maju Bersama	SMA/SMK Kabupaten Lahat (dinaspendidikanlahat.sumsel)	Inovasi pelayanan publik



37	Lapak Online	SMA/SMK Kabupaten Lahat (dinaspendidikanlahat.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
38	Pembelajaran dengan menggunakan Dadu dan Remi untuk Pelajaran Matematika	SMA/SMK Kabupaten Lahat (dinaspendidikanlahat.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
39	ADO (Apoteker Selalu ADO)	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
40	CHAMBER DISINSFEKTAN	SMA/SMK Kabupaten MUBA (dinaspendidikanmuba.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
41	PENGARSIPAN SURAT DENGAN MENGGUNAKAN GOOGLE DRIVE DAN GOOGLE FORM	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
42	BEL- GIA ( BEL BERBASIS ELECTRIC LAN - GLOVE IN AUTOMATIC ) DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KETERAMPILAN 4C PADA ABK	SMA/SMK Kabupaten PALI (dinaspendidikanpali.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
43	PENGEMBANGAN LBC BEE BREEDING CENTER	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel (dinaskehutanan.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
44	SISTEM INFORMASI PERHUTANAN SOSIAL (SIHUTSOS)	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel (dinaskehutanan.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
45	PEMBANGKIT LISTRIK DAN POMPA AIR SEDERHANA MELALUI PEMANFAATAN TENAGA SEPEDA MOTOR JURUSAN TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	SMA/SMK Kabupaten MURA (dinaspendidikanmura.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
46	SISTEM INFORMASI PENGUMUMAN KELULUSAN (SIPSAN)	SMA/SMK Kabupaten PALI (dinaspendidikanpali.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
47	ALAT OTOMATIS PENYIRAMAN TAMAN TENAGA SURYA	SMA/SMK Kabupaten PALI (dinaspendidikanpali.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
48	BATIK MANDI KASAI	SMA/SMK Kabupaten MURA (dinaspendidikanmura.sumsel)	Inovasi pelayanan publik



49	Optimalisasi Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Pembangkit Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Melalui Kunjungan Virtual	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan (disenergidanmineral.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
50	PEMBUATAN BEKASEM BIJI BALAM (MAKANAN FERMENTASI DARI LIMBAH BIJI KARET)	SMA/SMK Kota Prabumulih (dinaspendidikanprabumulih.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
51	SIPPDA (Sistem Informasi Pengaduan Perizinan Daerah)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan (dinasptsp.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
52	Pengalengan Pindang Burung	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
53	PENINGKATAN PELAYANAN TAMU-TAMU PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN MELALUI SISTEM APLIKASI SIFASIAMTAM	Dinas Kesehatan Sumatera Selatan (dinaskesehatan.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
54	SISTEM PELAYANAN PENGADUAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SUMSEL TANGGAP DI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Dinas Kesehatan Sumatera Selatan (dinaskesehatan.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
55	PENGGUNAAN BARCODE PADA APLIKASI E-OFFICE SISTEM MANAJEMEN ASET DI RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatimah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
56	STRATEGI PEMASARAN DENGAN SMS BLAST DI RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatimah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
57	PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PERMINTAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK BANTUAN KORBAN BENCANA MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI USULAN PERMINTAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK BANTUAN KORBAN BENCANA (SI-ULO KOBRA)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan (bpbd.sumsel)	Inovasi pelayanan publik



58	MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KEBENCANAAN MELALUI IN HOUSE TRAINING DI BPDB PROV. SUMSEL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan (bpbd.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
59	LAYANAN TRAUMA HEALING PASCA BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan (bpbd.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
60	PENINGKATAN KAPASITAS SDM MELALUI PELATIHAN ACLS DAN BTCLS PETUGAS UPTB TRAUMA CENTER DAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan (bpbd.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
61	Efektifitas Penerbitan Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Darat Berbasis Website Online	iga2020.provinsi.sumatera.s elatan (iga2020.provinsi.sumatera. selatan)	Inovasi pelayanan publik
62	OPTIMALISASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN DALAM MEMINIMALISIR KETERLAMBATAN PENGUSULAN SK PENSIUN APARATUR SIPIL NEGARA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan (bpbd.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
63	PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL MENUJU GOOD SERVICES	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
64	PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENGHADAPI KESIAPSIAGAAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan (bpbd.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
65	SISTEM INFORMASI LAPORAN KEBAKARAN HUTAN LAHAN (SILKA) DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan (bpbd.sumsel)	Inovasi pelayanan publik



66	DIGITALISASI INFORMASI RETRIBUSI DAERAH DI BAPENDA SUMSEL	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
67	PENINGKATAN PELAYANAN KESAMSATAN MELALUI SAMDES (SAMSAT DESA)	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
68	DIGITALISASI PELAYANAN PENDAFTARAN MELALUI MESIN ANTRIAN DIGITAL	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
69	Aplikasi Cari Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan (distkdantrasmigrasi.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
70	REMINDER	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
71	MEKANISME PEMBAYARAN GAJI TENAGA KERJA SUKARELA BLUD MELALUI INOVASI SIGABUD (SISTEM GAJI BLUD) PADA RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
72	PENINGKATAN PELATIHAN KESEHATAN TERAKREDITASI MELALUI METODE PERKONSULTASIAN DI UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Dinas Kesehatan Sumatera Selatan (dinaskesehatan.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
73	PERPUSTAKAAN ONLINE (DIGITAL LIBRARY)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan (sekretariatdprd.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
74	Digitalisasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. Sumsel (biro.pengadaan.barang.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
75	Sistem Informasi Seksi Kurikulum SMA Berbasis Web Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Pendidikan Prov. Sumsel (dinaspendidikan.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
76	Pelayanan Sarana Informasi Digital	Sekretariat Daerah Prov. Sumsel (sekretariat.daerah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik



77	Pengimplementasian Aplikasi Layanan Samsat Online Sumsel (SOS), E-Dempo (Elektronik Data dan Sistem Pajak Daerah Online), SIGNAL (Samsat Digital Nasional)	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
78	Menerapkan Pelayanan Pajak melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Modern channel seperti QRIS, EDC (Elektronik Data Capture), Indomaret dan Tokopedia	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
79	Pengembangan dan Perluasan Sistem Pembayaran Elektronik Samsat Online Regional (E-Dempo) melalui Indomaret dan Tokopedia	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
80	Sertifikasi dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan melalui Laboratorium Pengujian Sampel pada Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel (dinasketahananpangandanpeternakan.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
81	Digitalisasi Pelaporan Data Ketersediaan Kebutuhan dan Harga Pangan Strategis Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel (dinasketahananpangandanpeternakan.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
82	E-PENGADUAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan (distkdantransmigrasi.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
83	Peningkatan Fasilitas Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Sistem Registrasi Online Berbasis Zoho FORM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sumatera Selatan (bpsdmd.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
84	Sistem Informasi Kepala Desa Berakhlak	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sumatera Selatan (bpsdmd.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
85	Efektifitas Penerbitan Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Darat Berbasis Website Online	Dinas Perhubungan Prov. Sumsel (dishub.sumsel)	Inovasi pelayanan publik



86	Layanan Konseling Obat Pasien melalui Media Sosial dan Petugas Apoteker pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
87	SIMAS ( Sistem Informasi Manajemen Aset )	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
88	Pengelolaan layanan Informasi Data arsip statis digital berbasis Barcode	Dinas Kearsipan Prov Sumsel (dinaskearsipan.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
89	AKSIS TAKEPO (PENGADUAN ONLINE)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan (sekretariatdprd.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
90	optimalisasi Penataan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan melalui Sosialisasi di Desa Ibul Besar Dua Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel (dinasperkim.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
91	Penguatan Pengetahuan Perangkat Desa tentang Aset Desa di Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Selatan (dispemdes.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
92	Pengembangan Ekowisata Minahutan Taman Mata Mangrove	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel (dinaskehutanan.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
93	GERAKAN LITERASI BAHASA ISYARAT	Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel (dinasperpustakaan.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
94	Digitalisasi Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional (DIORKESTRA) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.	Dinas Kesehatan Sumatera Selatan (dinaskesehatan.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
95	KUE (Kartu Uang Elektronik) Pada ID Card ASN Sebagai Alat Pembayaran di Light Rail Transit (LRT) Palembang Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perhubungan Prov. Sumsel (dishub.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
96	Manajemen Sistem Informasi Pendidikan Berkelanjutan (SIDILAN) Di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik



97	Pengalengan Malbi Daging Khas Sumsel	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
98	Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Air Tanah Melalui Teknologi PAMSIMAS di Desa Lorok Kabupaten Ogan Ilir	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
99	PELAYANAN KESEHATAN TERPADU PADA LANSIA DI UPTD PANTI SOSIAL LANJUT USIA HARAPAN KITA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	Dinas Sosial Sumatera Selatan (dinsos.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
100	SISTEM INFORMASI PANDUAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BERBASIS ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumsel (rserba.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
101	PEMBUATAN SLIP GAJI PEGAWAI SECARA ONLINE PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumsel (rserba.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
102	SI JANGKO ( Sistem Informasi Aplikasi Penunjang Perkoperasian )	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumsel (dinas.koperasi.ukm.prov.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
103	Jerami Sifat (Jejaring Kemitraan RSUD Fatimah)	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
104	Welcome Nurse and Midwife	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
105	SEPPAKAD (Sistem Pengajuan dan Pengendalian Keputusan Direktur)	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
106	ALAD LABOR (Aplikasi Laporan Dinas Laboratorium)	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
107	MILEA (Mitra Layanan Dunia Maya)	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
108	ALPHA (Aplikasi Layanan Pengaduan dan Harapan)	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
109	Akselerasi Pelayanan Pendaftaran melalui Kerjasama Pemanfaatan KTP Elektronik	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik



110	DIGITALISASI LAYANAN KEBUTUHAN SURAT KETERANGAN MEDIS PASIEN SECARA ELEKTRONIK PADA RSUD SITI FATIMAH PALEMBANG	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi pelayanan publik
111	Penggunaan Kode Warna dalam Pencegahan Kejadian Missfile di Filling RS Ernaldi Bahar Prov Sumatera Selatan	Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumsel (rserba.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
112	Sistem Elektronik Rekonsiliasi Pendapatan Daerah pada BAPENDA ( E REKON)	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
113	DAWAI (Data Pegawai)	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatihah.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
114	SISTEM INFORMASI PENYULUH (SISULUH)	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumsel (dinas pertanian.holtikultura.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
115	Strategi Pembelajaran Kimia dengan Games dan Role Playing Pada Materi Ikatan Kimia	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin (dinas pendidikan banyuasin.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
116	Projek Kimia Pewarna Alami	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin (dinas pendidikan banyuasin.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
117	Optimalisasi Pengkoordinasian dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Melalui Sistem Eletronik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (bappeda.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
118	Pembuatan Indikator Asam Basa bahan Alami di Lingkungan Sekolah	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin (dinas pendidikan banyuasin.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah



119	Pembuatan Koloid "Es CiKoBu" Dalam Pembelajaran Kimia Berbasis STEM	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin (dinaspendidikanbanyuasin.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
120	SILAB (Sistem Informasi Pelayanan Laboratorium) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan (disenergidanmineral.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
121	Internet Banking dan SMS Banking Dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan dan Penerimaan Keuangan RSUD Siti Fatimah	Rumah Sakit Siti Fatimah (rssitifatimah.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
122	Sistem Informasi Inovasi Daerah (SINOVDA)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
123	PENINGKATAN SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM KE ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel (satpolpp.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
124	OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN LAPORAN PENERIMAAN PAD KABUPATEN / KOTA	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
125	Si-ABDI (SISTEM ABSENSI DIGITAL BERBASIS SMART PHONE)	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan (Bapenda.prov.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
126	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh di Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel (dinasperkim.prov.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
127	Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Konstruksi untuk Kegiatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman di Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel (dinasperkim.prov.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
128	Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah di Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan (disenergidanmineral.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah



129	Kesepakatan Bersama antar Kabupaten/Kota dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel (satpolpp.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
130	Optimalisasi Pendataan Tambang Tanpa Izin (PETI) Pasir dengan Menggunakan Titik Koordinat pada Kantor Cabang Dinas Regional VII, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan (disenergidanmineral.sumsel )	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
131	Digitalisasi Penyimpanan Arsip Surat Menyurat dan Arsip Lainnya Menggunakan Google Drive Cabang Dinas Regional VI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan (disenergidanmineral.sumsel )	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
132	Pembinaan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kawasan Perdesaan Provinsi Sumsel	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Selatan (dispemdes.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
133	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK (E-ARSIP) PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumsel (dinas pertanian.hortikultura.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
134	PENINGKATAN PELAYANAN MUTU DALAM PEMBUATAN DESIGN MIX FORMULA	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel (dinaspu.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
135	DIGITALISASI LAPORAN PROGRES KEGIATAN BIDANG JALAN DINAS PERKERJAAN UMUM (e - PROGRES)	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel (dinaspu.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
136	DIGITALISASI DOKUMEN KEGIATAN BIDANG JALAN BERBASIS WEB LOCALHOST	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel (dinaspu.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
137	UPAYA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI PERUBAHAN KONTRAK DI UPTD	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel (dinaspu.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah



138	SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN TANAMAN (SIPETA) PADA UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumsel (dinas pertanian.hortikultura.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
139	PENDATAAN PENEMPATAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU MELALUI WEB SISTEM INFORMASI ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU SUMATERA SELATAN	Dinas Perhubungan Prov. Sumsel (dishub.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
140	Penerapan Aplikasi E-Sarpras Dalam Mengoptimalkan Data Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Pendidikan Prov. Sumsel (dinas pendidikan.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
141	Pembinaan Kehorananian dalam Pendampingan Kesejahteraan Sosial Anak pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Dinas Sosial Provinsi Sumsel	Dinas Sosial Sumatera Selatan (dinsos.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
142	Peningkatan Pelestarian dan Perlindungan Ikan Endemik Lokal melalui Operasional Pengawasan Terpadu di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel	Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan (diskelautanperikanan.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
143	Inventarisasi dan Pembuatan Database Kondisi dan Kerusakan Perkerasan Jalan Berbasis ARC-GIS pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel (dinas pu.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
144	SI JANTAN BIMA "Penyusunan Sistem Informasi Database jalan dan Jembatan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel (dinas pu.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
145	UPAYA PENGENDALIAN DAN PENGLOLAAN ALAT ALAT BERAT MELALUI DIGITALISASI DAN INFORMASI (e-ALKAL)	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel (dinas pu.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah



146	Akselerasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi dan Pelaporan Kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata ruang Provinsi Sumatera Selatan	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel (dinaspu.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
147	PENGOLAHAN DATA RENCANA INVESTASI PELAKU USAHA BERBASIS ONLINEFORM DENGAN MEDIA QR-CODE SCANNING PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan (dinasptsp.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
148	SISTEM PENGELOLAAN DATA TEKNIS RUAS JALAN PROVINSI (SI - ANDALAN )	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel (dinaspu.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
149	" SIP - KAWAN SUMSEL " pada upptd jalan dan jembatan	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel (dinaspu.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
150	Pengelolaan Daerah Irigasi Berbasis Geographical Information System	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel (dinaspengelolaansumberdayaair.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
151	Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi Secara Digital di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel (dinaspengelolaansumberdayaair.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
152	Tertib Pengelolaan Administrasi Perlengkapan Pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah Sungai Musi	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel (dinaspengelolaansumberdayaair.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
153	Upaya Peningkatan Kinerja Petugas Pintu Air Berbasis Aplikasi E-PAKSI dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel (dinaspengelolaansumberdayaair.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
154	Optimalisasi Tertib Administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Belanja Berbasis Digital	Dinas Pemberdayaan Perempuan Sumatera Selatan (dispemberdayaanperempuan.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah



155	Pelaksanaan Tata Kelola Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Pada Sub Bagian Tata Usaha UPTB Science Techno Park Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Melalui Sistem Aplikasi KIR Digital	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
156	Tata Kelola Sarana dan Prasarana Menuju Teaching Factory Pada Sekolah SMK (E-Takola Sarpras SMK)	Dinas Pendidikan Prov. Sumsel (dinaspendidikan.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
157	Upaya Penguatan Sumber – Sumber Pendanaan Dalam Rangka Pembiayaan Non APBD/N Dengan Pemberdayaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (bappeda.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
158	SI-PEPI (SIstem Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal) Pada Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Provinsi Sumatera Selatan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
159	SELUANG (Sapa Keluarga Sumsel Agar Berdaya Dan Unggul)	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel (dinas-kominfo.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
160	Digitalisasi Bahan Fasilitasi, Koordinasi, dan Sinkronisasi Data Potensi Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DIPERI)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
161	GSM (Gerakan Sekolah Menyenangkan) SMKN 1 Rambang Dangku	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
162	MIKUT MANG ( Manisan dari Kulit Semangka)	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



163	Natur In Fashion Busana Pesta dengan Teknik Ecoprint Daun dan Pewarna Alami	SMA/SMK Kota Prabumulih (dinaspendidikanprabumulih.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
164	Kerupuk Biji Durian	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
165	Burger Pisla (Pemanfaatan Tumbuhan Pisang Sebagai Bahan Pembuatan Burger)	SMA/SMK Kota Prabumulih (dinaspendidikanprabumulih.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
166	Pemanfaatan Barang Bekas Untuk Pembuatan GAPI	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
167	Dodol Nangka	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
168	Kerupuk Kemplang Sirsak	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



169	Dodol Sirsak	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
170	DIGITALISASI ARSIP BIDANG KETATAUSAHAAN	SMA/SMK Kabupaten MUBA (dinaspendidikanmuba.sum sel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
171	Kerupuk Kemplang Nangka	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim .sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
172	LIRICA (Learning English Trough Music)	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel )	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
173	PUZZEL PETA KEPADATAN PENDUDUK	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel )	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
174	IRISAN KERUCUT DAN KINERJANYA PADA PENGGUNAAN TERHADAP KEHIDUPAN	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel )	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
175	Pendar (Jurnal Pengajaran dan Riset)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.	Inovasi Daerah lainnya sesuai



		sumsel)	dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
176	STORY TELLING THE CITY OF MINE (Mendongeng/berceritera tentang Kotaku)	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel )	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
177	MESIN PEMOTONG DAN PENERING KERUPUK KEMPLANG (MENTORING PULANG)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
178	MENUMBUHKAN KEBERANIAN SISWA DALAM PERAWATAN JENAZAH ( MEMANDIKAN )	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel )	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
179	PEYEK KALOCO ( Hevea brasiliensis)	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel )	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
180	ENTOK ENGLISH IN TIKTOK	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel )	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



181	KONVERSI MOTOR KONVENSIONAL MENJADI MOTOR LISTRIK (SI MOKO DI MOL)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
182	Penjernihan Air Sumur Menggunakan Karbon Aktif Kulit Pisang	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
183	BI-ROL (Bio Rockwool) sebagai Media Tanam Pakcoy (Brasissca rapa L) pada Metode Hidroponik Sistem Sumbu dengan Pupuk Organik Cair Terfermentasi	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
184	SELATIC (Semi-Elastic Plastic)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
185	PEMBELAJARAN KREATIF MATA PELAJARAN GEOGRAFI DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI SEKOLAH	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel )	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
186	Alat Pembersih Air Kolam Ikan Nila Dengan Metode Filtrasi/ Resirkulasi	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



187	APLIKASI PEMBELAJARAN KOLOID BERBASIS STEM MELALUI PEMBUATAN PUDING DARI TOMAT CONG KEDIRA	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel )	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
188	Pengenalan Filosofi Dan Keunikan Senjang Melalui Program Kerja Organisasi Siswa SMA Berupa Infografis Sebagai Upaya Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Selatan.	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
189	TAHFIDZ JUZ 30 DENGAN METODE INTENSIF LEARNING	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel )	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
190	Pembelajaran Blended Learning dengan menggunakan metode Flipped Classroom	SMA/SMK Kabupaten MURA (dinaspendidikanmura.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
191	LEARNING VOCABULARY AND BASIC CONVERSATION USING PICTURES	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel )	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
192	Pemanfaatan Google form sebagai pelayanan registrasi On line berbagai lomba siswa pada bidang SMK	Dinas Pendidikan Prov. Sumsel (dinaspendidikan.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



193	Aplikasi SKP Tahun 2021	SMA/SMK Kabupaten Lahat (dinaspendidikanlahat.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
194	Video Pembelajaran Teori Evolusi	SMA/SMK Kabupaten Lahat (dinaspendidikanlahat.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
195	BANK DATA KEPEGAWAIAN MENGGUNAKAN WORKSPACE FOR EDUCATION	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
196	PEMANFAATAN APLIKASI MOODLE UNTUK UJIAN DALAM Mendukung PROGRAM PAPERLESS	SMA/SMK Kabupaten MUBA (dinaspendidikanmuba.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
197	Smart Digital Farming Tanaman B merah dan Cabai merah di Kawasan SSTP	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
198	Kemitraan Quadrahelix Pengembangan Kluster Komoditas Penyanggah Inflasi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



199	BELAJAR FISIKA LEBIH MENYENANGKAN DAN NYATA PADA MATERI HAMBATAN LISTRIK	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel )	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
200	Eduwisata Petik Timbang Bayar Tanaman Hortikultura Unggul di SSTP	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
201	Pengembangan Kluster Budidaya Tanaman Bawang Merah di Dataran Rendah Kering Kawasan SSTP	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
202	E-Magazine Termokimia Untuk Meningkatkan Kreativitas Peserta Didik	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin (dinaspendidikanbanyuasin.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
203	Peningkatan Administrasi Kepegawaian Dengan Sistem Aplikasi E-AKP di Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	Dinas Pendidikan Prov. Sumsel (dinaspendidikan.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
204	Buku Digital Kimia Materi Titrasi Asam Basa Untuk Meningkatkan Berfikir Kritis Peserta Didik	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin (dinaspendidikanbanyuasin.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



205	Pengembangan Alat Peraga Kimia Untuk Reaksi Eksoterm dan Endoterm	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin (dinaspendidikanbanyuasin.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
206	PENGUMPULAN BERKAS KESISWAAN MELALUI GOOGLE FORM	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
207	Desa Inovasi Kampung Terapung	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
208	CAKE BIJI DURIAN	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
209	Strategi Pembelajaran Kimia Aktif dan Inovatif (ANTIF) dengan Pertarungan Pratikum Kimia	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin (dinaspendidikanbanyuasin.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
210	LAGU ADIWIYATA “ MARILAH KITA JAGA KEBERSIHAN”	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



211	Video Pratikum Kreatif Berbasis STEM "Alat Uji Elektrolit"	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin (dinaspendidikanbanyuasin.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
212	TEMPAT CUCI TANGAN OTOMATIS	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
213	KARYA TARI JUDUL DANG BELAJAR	SMA/SMK Kabupaten OKU (dinaspendidikanoku.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
214	ALAT PEMBELAH DURIAN	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
215	GAME EDUKASI WORDWALL	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
216	MODIFIKASI MESIN PEMOTONG RUMPUT MENJADI MESIN PENCABUT GULMA SAWAH	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



217	ALGA BINTUM (Alat Peraga Bilangan Kuantum)	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin (dinaspendidikanbanyuasin.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
218	TRIPOD DARI PIPA PARALON	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
219	MOTOR ADIWIYATA SERBAGUNA	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
220	LILIN DARI LAMPU LED	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
221	LAMPU TERAS OTOMATIS BERBASIS ARDUINO UNO	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
222	POWERBANK 29700 MAH	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



223	Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Pembelajaran	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin (dinaspendidikanbanyuasin.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
224	FASHION 3R	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
225	Penjernihan Air Keruh di Lingkungan Sekolah	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin (dinaspendidikanbanyuasin.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
226	KUNCI PENGAMAN PEDAL KOPLING	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
227	Strategi Penerapan PKBA dan BAGJA Menuju Sekolah Adiwiyata	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin (dinaspendidikanbanyuasin.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
228	Sinkronisasi Data Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Berbasis Google Drive pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Sumatera Selatan (dispemberdayaanperempua n.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



229	Program Akselerasi Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan Sumatera Selatan (dispemberdayaanperempuan.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
230	INTEGRASI PELABELAN NAMA ALAT DENGAN BARCODE KE VIDEO	SMA/SMK Kota Prabumulih (dinaspendidikanprabumulih.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
231	MESIN PENCACAH DAUN	SMA/SMK Kabupaten Muaraenim (dinaspendidikanmuaraenim.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
232	Inventarisasi secara mandiri dalam rangka tertib administrasi dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Aset Provinsi Sumatera Selatan "APLIKASI SIAP SUMSEL"	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan (bpkad.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
233	Sigap Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan (bpkad.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
234	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pelatihan Guna Mendukung Program Transformasi Begancang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sumatera Selatan (bpsdmd.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



235	Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan melalui Aplikasi SIPERJAKA pada Satpol PP Provinsi Sumsel	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel (satpolpp.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
236	Peningkatan Peran Sumber Daya Manusia APIP dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi dan Penjamin Kualitas (Quality Assurance)	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (inspektorat.daerah.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
237	Iventarisasi dan pembuatan database jembatan berbasis informasi teknologi di uptd jalan dan jembatan	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel (dinaspu.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
238	SI ABAH INDAH (Sistem Aplikasi Bank Data Pimpinan Daerah)	Biro Humas Protokol Sekretariat Daerah Prov. Sumsel (birohumas.setda.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
239	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel (dinasketahananpangandanpeternakan.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
240	SHOW WAFER (Straightforward Water Purifier) : Powered by a Dinamo and a Combination of Filtering and Coagulation Techniques PAUSE (Propeller Battery House)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
241	SAGA'S BAG	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan



			Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
242	Pengaruh Penambahan Ampas Kopi pada Pertumbuhan Tanaman Tomat (Penanda Hemat)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
243	AFFECTIVITIES OF FACILITIES, TEACHING STAFF AND SCHOOL PROGRAM TO STUDENT AND EDUCATION QUALITY IN A SCHOOL	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
244	AK-BATEEQ JUMPANG (ANGGIE KARTIKA BATIK JUMPUTAN DAUN KETAPANG)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
245	PETIKAN MIVICHEN (Pemanfaatan limbah plastik dan mikroalga (Chlorella vulgaris) untuk konversi CO2 menjadi O2)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
246	ALFOTAS (Alumunium Foil With Tea Dregs Waste Innovation Collaboration As A Friendly Waste Water Purifier)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
247	PLATCOR (Innovation of leak-proof ceiling by utilizing moringa leaves, water hycint and plastic waste)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



			Daerah
248	RRC (Recycle Rain Coat)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang. sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
249	BADAI-LAB (Bangle, Dringo, Serai, dan Limbah Air Beras) sebagai Pestisida Nabati untuk Pengendalian Hama	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang. sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
250	Modifikasi Biopori dengan (Serseriabolam) Serat Sansevieria trifasciata dan Karbon Aktif Tulang Ayam Guna Pemanfaatan Kembali Air Limbah	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang. sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
251	Metode Adsorpsi Dengan SISA- PALIT guna mengolah Limbah Air Wudhu (LAW)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang. sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
252	Statlock (Stationay Clock)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang. sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
253	Analisis Pemahaman Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Minat Menabung di Bank Syariah	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang. sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



254	T-REX Of A sebagai Penjernih Air Limbah Laundry menggunakan Arang Aktif Cangkang Ketapang (Terminalia catappa)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
255	Cindoll (Culture Indonesian Doll) for future atau Boneka budaya rajut berbahan dasar limbah kantong plastik	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
256	The Influence of Positive and Negative Affirmation from The Educators on Students's Mentality	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
257	WEBE (IoT Based pH Water Communicator Using Telegram) to Encourage Society Controlling Raw Water Supply	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
258	Debog Crispy	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
259	GePeNgan PeTan (Gel Pengharum Ruangan Pengurang Polutan) dengan Ekastrak Sansevieria trifasciata dan Ekstrak Terminalia	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



260	Implementation of Gender Equality	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
261	Metaponik (Media Tanam Hidroponik Organik)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
262	MOKA APPS (MEDIA INFORMASI PENANGANAN KRISIS AIR) BERBASIS ANDROID	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
263	Utilization Jemputan Waste Water By O-GLOW (Optimization Galvani Cell As Electro from Wasterwater)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
264	Perilaku Masyarakat terhadap Air Sungai di Sekitaran Aliran Anak Sungai Musi (MASAIR INDOSAT)	SMA/SMK Kota Palembang (dinaspendidikanpalembang.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
265	Sistem Informasi Potensi Desa/ Kelurahan Terintegrasi (SI PDKT) Untuk Inovasi Di Provinsi Sumatera Selatan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



266	Penanaman Bawang Merah di Lahan Basah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan (balitbangda.sumsel)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
-----	---------------------------------------	--	---

## 7. Penutup

Selaku Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, kami telah berupaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sejalan dengan yang telah digariskan dan berkat adanya dukungan dari seluruh Badan, Dinas, Biro dan Kantor di Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah syukur, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan pelaksanaan tugas-tugas Tahun 2023 yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah menunjukkan perkembangan, kemajuan dan peningkatan yang cukup menggembirakan. Apa yang kita lakukan bersama-sama selama Tahun 2023 semata-mata ditujukan bagi kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat dan lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan berbagai program/kegiatan banyak ditemukan kendala-kendala, kendati pada umumnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan modal bagi evaluasi dan penyempurnaan di tahun-tahun mendatang.

Segala dukungan yang telah diberikan kepada kami, dengan tulus disampaikan ucapan terima kasih, dengan dukungan tersebut telah memberikan kekuatan dan semangat untuk bekerja keras, diikuti semangat pengabdian dalam mengemban tugas yang mulia ini. Ucapan terima kasih yang sama juga disampaikan kepada seluruh pihak atas saran, koreksi dan kritik, khususnya terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2023.

Kesemuanya itu, merupakan wujud rasa ikut bertanggung jawab dari semua pihak sebagai peran serta untuk memacu peningkatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini.



Untuk itu, mari kita mewujudkan Sumatera Selatan Maju untuk Semua, yang mensejahterakan warga Sumatera Selatan dengan percepatan pembangunan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan serta perlindungan-Nya kepada kita semua, Amin

### DAFTAR PENGHARGAAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

No.	Nama Penghargaan	Tanggal	Nama Negara/Instansi yang Memberikan
1	Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya	10 Januari 2023	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
2	Penghargaan Program Jaminan Ketenagakerjaan	12 Januari 2023	BPJS Ketenagakerjaan
3	Penghargaan Anugerah Grand IKADI Award 2022 sebagai Gubernur Peduli Dakwah Islam Rahmatan Lil'Alamin	22 Januari 2023	IKADI (Ikatan Da'i Indonesia)
4	Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022	01 Februari 2023	Kepala Ombusmand RI
5	Penghargaan Pemerintah Sumatera Selatan sebagai Provinsi dengan Nilai Skor Indeks Inovasi Tertinggi Dengan Predikat "Sangat Inovatif" Tahun 2022	8 Februari 2023	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
6	Penghargaan kepada Gubernur Sumsel pada Percepatan Penurunan Angka Stunting	15 Februari 2023	BKKBN Pusat



7	Penghargaan ETLE Award kepada Gubernur Sumsel atas Dukungan dan Sumbangsih dalam Pengembangan Implementasi ETLE Nasional Presisi	10 Maret 2023	Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
8	Penghargaan Anugerah Tokoh Terbaik Sumsel Tahun 2022	22 Maret 2023	DPP Persatuan Umat Islam (PUI)
9	Piagam Penganugerahan kepada Gubernur Sumsel atas perhatian dan Partisipasi Gubernur Sumsel selaku Keluarga BMKM di Sumsel dan mendapatkan Sebutan "Bandaro Sati Nan kayo"	24 Maret 2023	Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau (BMKM) Sumatera Selatan
10	Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 9 atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022	10 Mei 2023	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
11	Penghargaan The Best Governor 2023 In Visionary Performance Growth to BPD	11 Mei 2023	Majalah Infobank dan The Asian Post
12	Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Meraih Peringkat Terbaik kedua Tingkat Nasional	16 Mei 2023	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS RI
13	Penghargaan sebagai Tokoh Kepemimpinan Kearsipan Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Kader Kearsipan pada Tingkat Desa	22 Mei 2023	Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
14	Penghargaan kepada Sumatera Selatan sebagai	24 Mei 2023	Board of Expert ESQ Group



	Dua Nasional dengan Implementasi Kompeten		
15	Penghargaan kepada Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lima Besar Indeks Implementasi Loyal	25 Mei 2023	Board of Expert ESQ Group
16	Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Penerima Anugerah Merdeka Belajar Kategori Pemerintah Daerah Sub Kategori Pencegahan 3 Dosa Besar Pendidikan	29 Mei 2023	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset
			dan Teknologi Republik Indonesia
17	Penghargaan BKN AWARD 2023 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kategori Special Mention Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	30 Mei 2023	Badan Kepegawaian Negara RI
18	Piagam Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Tani Nelayan Maha Utama kepada Gubernur Sumsel atas Jasa- Jasa yang Besar terhadap Kemajuan Petani dan Nelayan	07 Juni 2023	Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia
19	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) meraih Predikat Provinsi Terbaik Kedua Nasional dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	14 Juni 2023	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI



20	Penghargaan Gubernur Sumsel mendapatkan Pin Emas atas jasa dan kontribusi memberikan dana hibah untuk penyelenggaraan Pertikanas di Provinsi Sumsel dan pembangunan 4 Rumah Dinas di SPN Betung serta mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional Mabes Polri pada Tahun 2022.	01 Juli 2023	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
21	Piagam penghargaan sebagai mitra terbaik atas kontribusinya yang luar biasa.	04 Juli 2023	TVRI
22	Penghargaan Gubernur Sumatera Selatan Dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalencana Pembangunan	06 Juli 2023	Presiden RI
23	Penghargaan Pemprov. Sumsel pada BKN Award 2023 kategori Special Mention Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian.	11 Juli 2023	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
24	Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian	14 Agustus 2023	Kementerian Pertanian RI
25	Penghargaan Wredatama Utama	21 Agustus 2023	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)
26	Penghargaan Bimasena pada Gelaran Marketing Festival Sumsel 2023	22 Agustus 2023	Markplus.Inc



27	Penghargaan Green Leadership “NIRWASITA TANTRA” kategori Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah tahun 2022	29 Agustus 2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia
28	Penghargaan Indonesia Award 2023 Kategori Inisiatif dalam Pembangunan Infrastruktur	31 Agustus 2023	INews TV
29	Penghargaan Karya Bakti	01 September 2023	Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
30	Penghargaan kategori “Apresiasi Daerah Peduli Pengembangan UMKM dan Potensi Sumber Daya Lokal”	11 September 2023	Kementerian Koperasi dan UKM RI
31	Penghargaan pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam pelatihan skrining tumbuh Kembang melibatkan 1.000 guru PAUD dalam Kota Palembang	14 September 2023	Museum Rekor Indonesia (MURI)
32	Pemberian Gelar adat “Pangeran Batuah Sekati”	17 Oktober 2023	Kota Lubuk Linggau
33	Penghargaan Apresiasi pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) Tingkat Provinsi tahun 2023.	24 Oktober 2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI
34	Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumsel sebagai Akselerator Entas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem	31 Oktober 2023	Tribun Network
35	Pemberian Gelar adat “Suttan Mangku Kresidenan”	7 November 2023	Kabupaten OKU Timur
36	Pemberian Gelar adat “Meraje Emban Adat”	19 November 2023	Ketua Adat Kab. Muara Enim



37	Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumsel Atas komitmen dan kepedulian dalam pengembangan profesi guru dan persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel	27 November 2023	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel
38	Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN 2023 dengan dua kategori penghargaan yaitu Kategori Baik Nilai Sistem Merit dan Kategori Baik Indeks Kualitas Pengisian JPT	7 Desember 2023	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
39	Penghargaan sebagai Juara Pertama Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 dengan Predikat Pemerintah Provinsi Terinovatif	12 Desember 2023	Kementerian Dalam Negeri RI
40	Penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2023 kategori Nilai Tertinggi se-Sumatera	12 Desember 2023	Kementerian Dalam Negeri RI
41	Penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2023 kategori Terbaik Pertama Regional I (Pulau Sumatera).	13 Desember 2023	Kementerian Dalam Negeri RI
42	Penghargaan Provinsi Penerima Parahita kaparya tahun 2022 kategori Madya	13 Desember 2023	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
43	Warisan Budaya Tak Benda Incang - Incang Pedamaran (OKI)		
44	Warisan Budaya Tak Benda JidurnPedamaran (OKI)		
45	Warisan Budaya Tak Benda Telok Abang (Palembang)		
46	Warisan Budaya Tak Benda Sedekah Balaq (OKU Timur)		
47	Warisan Budaya Tak Benda Tari Erai-Erai (Lahat)		



48	Juara II kategori promosi wisata digital (Aplikasi disbudpar OKI)		
49	Juara I kategori destinasi Unik terbaik (Kampung Inggris desa tempirai Kab. Pali)		
50	Juara II kategori atraksi Budaya terbaik (Tari Lading Kab. Pali)		
51	Juara I kategori Wisata Air terbaik (Ranau Rafting Kab. OKUS)		
52	Juara II kategori destinasi kreatif terbaik (Wahana Tirto Mulyo Kab. Muba)		
53	Juara III kategori dataran tinggi terbaik (Kayu Kambing Kab. Lahat)		
54	Juara III kategori kampung adat terbaik (Rumah Baghi desa bangke Kab. Lahat)		
55	Juara III kategori makanan tradisional terbaik (Kab. Empat Lawang)		
56	Juara III kategori festival pariwisata terbaik (Festival serampungan musi Kab. Empat Lawang)		



***PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN***